

# **STRATEGI KOMUNIKASI MENGATASI RENDAHNYA INTEGRITAS SATPOL PP DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN KEPATIHAN BANDUNG**

**(Studi Kasus Strategi Komunikasi Politik Walikota Bandung Ridwan Kamil dalam Mengatasi Rendahnya Integritas Satpol PP Kota Bandung)**

Oleh:

Achmad Abdul Basith<sup>1</sup>, Henny Sri Mulyani<sup>2</sup>  
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran  
basithpatria@gmail.com<sup>1</sup>

## **ABSTRAK**

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi masalah hampir di setiap kota besar. Pendekatan yang tidak tepat, mampu menyulut bentrokan antara pedagang dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Perlu ada strategi komunikasi politik yang tepat agar penertiban berjalan lancar. Jokowi, Tri Rismaharini, dan Ridwan Kamil punya pendekatan yang berbeda dalam melakukan penertiban PKL di daerahnya masing-masing.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi politik Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dalam menertibkan PKL di Jalan Kepatihan Bandung, khususnya soal rendahnya integritas petugas Satpol PP, yang selama ini menjadi salah satu penyebab selalu gagal penertiban. Metode yang digunakan dari penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Walikota Bandung Ridwan Kamil, Kepala Satpol PP Kota Bandung Ferdi Ligaswara, Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Haru Suandharu, Koordinator PKL Kepatihan Muhammad Taufik, dan beberapa perwakilan masyarakat Kota Bandung.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi Walikota Bandung Ridwan Kamil dalam penertiban PKL, khususnya masalah rendahnya integritas Satpol PP efektif, yaitu melalui penegakan aturan dengan melakukan pemecatan kepada oknum Satpol PP yang kedapatan melakukan pungli, penyitaan HP personil Satpol PP sebelum melakukan penertiban, serta tidak menyampaikan rencana penertiban kepada anggota sebelum hari pelaksanaan.

Kata kunci: Kota Bandung, Pedagang Kaki Lima, Penertiban PKL, Ridwan Kamil, Satpol PP

---

## **PENDAHULUAN**

Bandung tumbuh menjadi kota besar yang menarik untuk dikunjungi, baik oleh wisatawan maupun kaum perantau. Bak gula bagi kawanan semut. Kondisi ini yang membuat pertumbuhan penduduk di Kota Bandung semakin pesat. Mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung pada tahun 2000 memiliki 1,5 juta penduduk. Bahkan pada tahun 2013 laju pertumbuhan penduduk di Kota Bandung mencapai angka 2,5 juta penduduk.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Data BPS Kota Bandung : <http://bandungkota.bps.go.id/subyek/penduduk-2013>

Semakin pesatnya pertumbuhan Kota Bandung, ternyata juga diikuti jumlah kaum urban yang meningkat. Hal tersebut yang juga memicu tumbuhnya Pedangan Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung, karena se

Pemerintah Kota Bandung memiliki Peraturan Daerah (Perda) no. 11 tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3), yang salah satu isinya mengisaratkan kawasan 7 titik (Alun-alun, Jl. Kepatihan, Jl. Dalem Kaum, Jalan Asia Afrika, Jl. Merdeka, Jalan Otista dan Jl. Dewi Sartika) harus terjaga kebersihan dan ketertibanya, termasuk dari Pedagang Kaki Lima (PKL) yang seringkali berjualan hingga memenuhi badan jalan dan menghambat laju arus lalu lintas.

Permasalahan PKL di Kota Bandung sudah menahun. Setidaknya pada masa pemerintahan sebelumnya, permasalahan PKL tak mampu diselesaikan. Khususnya di kawasan 7 titik tersebut. Berbagai upaya pernah dilakukan, salah satunya upaya penertiban dengan memberikan kompensasi kepada pedagang agar kembali ke kampung halamannya. Namun, ternyata usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Bahkan menjadi program sia-sia karena dinilai menghamburkan anggaran.

Jika melihat kondisi tersebut, yakni di Jalan Kepatihan, merupakan salah satu tempat dari kawasan tujuh titik yang menjadi prioritas pemerintah Kota Bandung untuk ditertibkan dari pedagang kaki lima. Ruas jalan yang berada di pusat Kota Bandung ini, sejatinya bisa dilalui oleh dua atau tiga kendaraan roda empat secara bersamaan. Namun karena banyaknya PKL, satu kendaraan di satu lajur pun menjadi susah untuk melintas.

Kehadiran Ridwan Kamil sebagai Walikota ke-24 Kota Bandung sejak 16 September 2013, memiliki tekad untuk menertibkan pedagang di kawasan ini. Karena sebelum menjadi walikota, Ridwan Kamil juga pernah menjadi pengamat tata kota dan aktivis pemuda, yang sering kali mengkritisi soal ketidaktertiban PKL di Kota Bandung.

Keseriusan Pemerintah Kota Bandung dalam menertibkan PKL tercermin dari program kerja yang disusun oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Wakil Walikota Bandung Oded Muhammad Danial, juga memasukkan PKL sebagai salah satu fokus yang akan diurus selama kepemimpinannya.

Dalam kepemimpinannya, mulai awal Februari 2014, Pemerintah Kota Bandung melakukan tindakan tegas dengan menegakkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Dalam Perda itu disebutkan, siapa saja yang membeli barang di PKL di zona merah akan didenda sebesar satu juta rupiah. Upaya Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil untuk menata Kota Bandung tersebut, ternyata tidak sepenuhnya didukung warga.

Seorang komunikator profesional, adalah orang yang menerjemahkan sikap, pengetahuan, dan minat suatu komunitas bahasa ke dalam istilah komunitas bahasa yang lain yang berbeda tetapi menarik dan dapat dimengerti. Komunikator profesional menghubungkan golongan elit dalam organisasi atau komunitas mana pun dengan khalayak umum, secara horizontal menghubungkan dua komunitas bahasa yang dibedakan pada tingkat struktur sosial yang sama (Nimmo, 2005:33).

Bahkan tidak jarang menuai protes dari berbagai kalangan, usai penertiban PKL di Jalan Kepatihan dan Jalan Merdeka, Januari 2014 lalu. Tidak hanya protes melalui media saja, tetapi juga protes melalui media sosial milik Walikota Bandung, yakni twitter. Seperti yang pernah dilansir di beberapa pemberitaan di media massa, salah satunya *www.okezone.com* edisi Senin, 27 Januari 2014 – 16.12 WIB, yang memberitakan:

Menertibkan PKL, kata Ridwan Kamil, bukan persoalan mudah. Bukan hanya dari sisi PKL nya saja, melainkan dari masyarakat. Ketika mereka berbelanja di kaki lima, praktis PKL makin betah berjualan dan makin berjamur. “Kan kalau tidak ada yang membeli tidak ada yang menjual juga,” cetusnya. Hal itu yang ingin disadarkan. Perda akan diberlakukan dengan tegas. Aturan pun harus dijalankan dengan penuh kesadaran

semua pihak. “Mereka terbiasa melakukan transaksi dan tidak merasa bersalah bahwa dia bagian dari yang membuat kemacetan dan pelanggaran,” tandasnya.” (ton)<sup>2</sup>

Dalam fokus program kerja pemerintah Kota Bandung, penanganan masalah PKL menjadi prioritas kedua untuk secepat mungkin diselesaikan, karena dianggap menjadi hambatan dan memperburuk penampilan kota di mata warga daerah lain. Untuk itu secara khusus dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) PKL, yang bertugas untuk mengurus permasalahan seputar Pedangan Kaki Lima. Pokja PKL ini secara khusus bertugas membentuk Sub. Dinas Sektor Ekonomi Informal, membentuk Satpol PP di Kecamatan, mengerahkan Tim Gabungan (Militer/Polisi), menyiapkan Kartu PKL, membentuk Forum PKL, menyiapkan Kredit PKL, membangun atau merevitalisasi Pasar-pasar Baru (PD Pasar), menyiapkan Penampungan Sementara (Aset), Desain Jongko atau Lapak PKL, Spatio Temporal di Parkir-parkir Kantor, hingga Media atau Brosur Kampanye Tertib PKL.

Jalan Kepatihan berada di pusat Kota Bandung, tak jauh dari alun-alun sebagai simbol pusat kota. Rumah Dinas Walikota Bandung pun letaknya berdekatan dengan kawasan ini. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas untuk menegakkan Perda, dibuat tak berdaya karena jumlah yang terbatas, dan ulah oknum petugas yang bisa diajak kompromi sehingga melakukan pembiaran terhadap apa saja yang dilakukan oleh para PKL. Maka tak heran jika selama bertahun-tahun kawasan ini kumuh dan semrawut. Ridwan Kamil sebagai pejabat baru di lingkungan Pemkot Bandung memiliki target untuk membuat kawasan jalan ini kembali nyaman dilewati.

Menertibkan Pedagang Kaki Lima yang sudah puluhan tahun ada di kawasan Jl. Kepatihan Bandung, bukanlah perkara mudah. Namun pasti membutuhkan strategi, khususnya komunikasi politik yang baik dan cerdas dari Walikota Bandung. Maka dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui secara khusus dan mendalam tentang Komunikasi Politik yang dilakukan oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil untuk Mengatasi Rendahnya Integritas Satpol PP Kota Bandung dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jl. Kepatihan Bandung.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. Studi kasus sendiri adalah metode riset yang menggunakan berbagai sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis. Penelaah berbagai sumber data ini membutuhkan berbagai macam instrument pengumpulan data. Metode penelitian ini bisa menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipan, dokumentasi-dokumentasi, kuisioner, bukti-bukti fisik, dan lainnya (Kriyantono, 2006).

Ditulis oleh Prof Deddy Mulyana dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif, memasukan semua penelitian naturalistik ke dalam paradigma interpretif, varian-variannya mencakup teori dan prosedur yang dikenal sebagai etnografi, fenomenologi, etnometodologi, interaksionisme simbolik, psikologi lingkungan, analisis semiotika, dan studi kasus. Studi kasus adalah suatu eksplorasi dari sebuah sistem terbatas atau suatu kasus secara mendetail, pengumpulan data secara mendalam dari informasi-informasi (Creswell, 1998: 61).

Sebagai suatu metode kualitatif, studi kasus mempunyai beberapa keuntungan. Lincoln dan Guba (Mulyana, 2001:201) mengemukakan bahwa keistimewaan studi kasus meliputi hal-hal berikut:

---

<sup>2</sup> Sumber: <http://news.okezone.com/read/2014/01/27/526/932320/ridwan-kamil-tak-gentar-diprotas-terkait-penertiban-pkl>

1. Studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian emik, yakni menyajikan pandangan subjek yang diteliti.
2. Studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari.
3. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden.
4. Studi kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual tetapi juga keterpercayaan (trust worthiness).
5. Studi kasus memberikan "uraian tebal" yang diperlukan bagi penilaian atas transferabilitas.
6. Studi kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut.

Penelitian ini dilakukan di:

1. Rumah Dinas Walikota Bandung, Jalan Dalem Kaum no 1 Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung.
2. Studio Radio PRFM, di Jalan Braga 5 Bandung, yang setiap senin Walikota Rutin bersiaran mendengarkan aspirasi warga melalui program "Ngabandung"
3. Kantor Walikota Bandung, Jalan Wastukencana no 2 Bandung
4. Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, Jalan Aceh no 47 Bandung
5. Eliza Bakery Jalan Kepatihan no 21 Bandung.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah: teknik utama menggunakan *indepth interview*, sebagai pendukung digunakan observasi dan analisis dokumen. Untuk memperoleh pemahaman dan makna mendalam tentang Komunikasi Walikota Bandung dalam penertiban PKL Jalan Kepatihan, peneliti memerlukan data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah dokumentasi proses penertiban yang dilakukan oleh Walikota Bandung mulai dari tahap pertama, hingga eksekusi.

Selanjutnya peneliti juga membutuhkan sumber data lain yang merupakan persepsi dan pandangan dari orang-orang yang terlibat dalam proses Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Kepatihan Bandung. Selain itu, peneliti juga meminta pandangan umum dari masyarakat.

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam kepada informan untuk mendapatkan data-data primer. Wawancara dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan tidak terstruktur untuk mendapatkan kedalaman data yang diinginkan.

Selain data primer, peneliti juga membutuhkan data sekunder, yang merupakan data pendukung. Data sekunder diperoleh dari luar data primer. Untuk menentukan data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, observasi dan studi pustaka yang berkaitan dengan proses Penertiban PKL di Kawasan Jalan Kepatihan Bandung, khususnya soal integritas petugas Sat Pol PP.

Observasi yang dilakukan adalah dengan mengamati kondisi saat ini kawasan Jalan Kepatihan, dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya, berdasarkan pengalaman pribadi peneliti.

Data-data sekunder lainnya diperoleh dengan studi pustaka terhadap dokumentasi yang pernah diabadikan oleh tim humas Pemerintah Kota Bandung atau para wartawan.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan gambar statistik. (Lofland dalam Moleong, 2005:157 ).

Sumber data adalah salah satu hal yang paling vital dalam penelitian. Terdapat dua jenis data yang biasanya dilakukan dalam penelitian sosial, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data primer akan menggunakan wawancara dengan Walikota Bandung Ridwan Kamil, Kepala Satpol PP Kota Bandung Ferdy Ligaswara, Koordinator Pedagang Kaki Lima-PKL dan Muhammad Taufik, serta beberapa narasumber yang dipilih secara acak. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan-laporan, internet, surat kabar, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jl. Kepatihan sudah lama dikeluhkan. Namun hal tersebut hingga pertengahan tahun 2013 tak lekas mampu diselesaikan oleh pemerintah terkait. Alasan warga mengeluhkan keberadaan PKL karena menjadi penyebab kemacetan, jalan jadi kumuh dan semrawut.

Pemerintah sebelumnya sebenarnya tak tinggal diam. Berbagai upaya pernah dilakukan, mulai dari penertiban paksa, relokasi, hingga pemberian kompensasi bagi PKL untuk kembali ke kampung halamannya. Namun upaya tersebut tak membuahkan hasil maksimal. Setidaknya hingga akhir 2013 PKL masih memenuhi Jalan Kepatihan, jalan yang menjadi penghubung antara jalan Oto Iskandardinata (Otitsta) dan Jalan Dewi Sartika.

Lokasi jalan yang berada tak jauh dari Rumah Dinas Walikota Bandung membuat kawasan ini jadi sorotan. Mana mungkin pemimpin Bandung tak melihat ketidaktertiban yang ada di sekitar rumahnya. Sehingga masyarakat menaruh curiga akan komitmen pemerintah Kota Bandung terhadap upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung no. 11 Tahun 2005 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan (K3) dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.

Permasalahan PKL di Kota Bandung memang cukup kompleks. Selain menjadi ciri sebuah kota besar, PKL di Bandung juga memiliki karakteristik yang berbeda dan unik dibanding dengan daerah lain. Termasuk dengan Surakarta (Solo) yang sering disebut oleh media sebagai daerah yang berhasil menertibkan PKL tanpa konflik. Oleh karena itu, penertiban PKL yang ada di Bandung tentu menggunakan cara dan strategi tersendiri.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu, yang menjadi inisiator dan perumus Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL, mengatakan jika hasil kajiannya bersama dengan sejumlah pakar mengatakan jika yang menjadi permasalahan mendasar gagalnya pemerintah Kota Bandung dalam penertiban PKL adalah cara pandang pemerintah terhadap PKL.

Selama ini Pemerintah Kota Bandung memandang jika PKL adalah persoalan atau masalah. Sehingga dalam penanganannya harus dilarang bahkan diusir dari lokasinya berjualan karena dianggap mengganggu. Padahal jika cara pandangnya diubah. Maka persoalan ini bisa ditangani dengan lebih halus, tanpa harus merugikan semua pihak.

“Dulu saya mencoba dialog ke Pak Priana, Kasatpol PP sebelumnya. Katanya harus punya konsep. PKL tidak boleh dilihat sebagai persoalan tetapi potensi. Dulu pemerintah kota melihat bahwa PKL itu adalah masalah. Masalah aja,” kata Haru Suandharu<sup>3</sup>

Hasil Wawancara dengan Walikota Bandung Ridwan Kamil, pada Minggu 17 Mei 2015 di Rumah Dinas Kota Bandung (Pendopo) pada pukul 22.00 WIB s.d selesai, menyebutkan ada beberapa permasalahan yang selama ini menjadi penyebab gagalnya upaya penertiban PKL di Kota Bandung, khususnya di Jalan Kepatihan. Permasalahan ini ia potret

---

<sup>3</sup> Wawancara Mantan Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu, Senin 18 Mei 2015, pukul 21.00 WIB, di Kantor Radio PRFM Jalan Braga no 5 Bandung

saat sebelum menjadi walikota hingga merasakan sendiri sebagai Walikota Bandung sejak akhir tahun 2013 lalu, diantaranya:

### **1. Kurangnya Jumlah Petugas Sat Pol PP**

Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Bandung memiliki peran strategis dan kunci dalam keberhasilan penegakan Peraturan Daerah (Perda). Termasuk keberhasilan penegakan Perda Kebersihan Ketertiban Keindahan (K3) dan Perda Penataan dan Pembinaan PKL. Dalam tugas dan fungsi Sat Pol PP disebutkan bahwa tugas utamanya adalah mengawal tegaknya Perda di Kota Bandung. Itu sebabnya Sat Pol PP juga dikenal sebagai Tim Penegak Perda.

Permasalahannya adalah, saat ini kota yang dihuni sekitar 2,4 juta jiwa ini tercatat hanya memiliki sekitar 430 PNS yang bertugas di Sat Pol PP Kota Bandung, dan hanya 120 diantaranya yang bertugas di lapangan. Itu pun ada beberapa yang mulai memasuki masa pensiun. 120 anggota Sat Pol PP itu tidak hanya bertugas mengawal tegaknya perda K3 atau menertibkan PKL, tetapi juga harus mengawal puluhan Perda Kota Bandung yang lain.

Jumlah pelanggar memang tidak sebanding dengan jumlah petugas yang menertibkannya. Rasio perbandingannya terlalu besar. Idealnya kota sekelas Bandung setidaknya memiliki 500 personil lapangan Sat Pol PP.

Kendala semakin terasa saat petugas Sat Pol PP difokuskan untuk menertibkan satu permasalahan, maka permasalahan yang lain akan terabaikan. Seperti ketika Sat Pol PP menertibkan Pedagang Kaki Lima di kawasan Jalan Kepatihan Bandung dengan menurunkan seluruh anggotanya, maka permasalahan lain seperti reklame liar dan maraknya gelandangan dan pengemis menjadi dinomorduakan. Itu permasalahan yang selama ini menghambat proses penertiban Pedagang Kaki Lima di sejumlah lokasi di Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menjelaskan jika permasalahan ini ingin segera diselesaikannya. Namun permintaan Pemkot Bandung untuk penggantian 3000 PNS yang sudah memasuki masa pensiun, hanya disetujui 200 anggota PNS baru oleh Kementerian Dalam Negeri. Ironisnya dalam penerimaan CPNS tahun 2015, dari 98 kursi yang dibuka hanya 51 CPNS yang memenuhi kriteria. Artinya pada tahun ini Sat Pol PP Kota Bandung hanya akan mendapatkan tambahan 51 personil.

“Membangun Bandung itu harus dengan kolaborasi. Jika hanya mengandalkan Pemkot, susah. Perubahan itu ada, tapi lambat. 3 tahun terakhir hilang 3000 PNS karena pensiun. Minta ganti dikasih cuma 200. Bagaimana kita mau ngebut? Maka masyarakat Bandung harus kolaborasi,” kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.<sup>4</sup>

Jika dijumlahkan, pada tahun 2015 ini Kota Bandung memiliki 171 personil lapangan Sat Pol PP. Hal tersebut tak lantas membuat upaya penertiban PKL di Kota Bandung berjalan mulus. Bahkan jika diperitungkan lagi, jumlahnya masih jauh dari ideal. Maka Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menerapkan upaya penertiban berkala bagi masalah PKL di Kota Bandung. Ridwan menargetkan satu wilayah penanganan dalam tiga bulan.

“Sekarang itu kita bicara metematika. Target saya per 3 bulan per satu titik. Pasukan belum ketemu. saya siasati. Kalau ada nanya kenapa Cicadas belum. Kalau belum artinya pasukan belum sampai ke sana atau solusi pemindahan belum ketemu, kita hanya akan menertibkan kalau solusi sudah ketemu,” kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Minggu 17 Mei 2015, pukul 22.00 WIB, di Pendopo Kota Bandung Jalan Dalem Kaum no 1 Bandung.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Minggu 17 Mei 2015, pukul 22.00 WIB, di Pendopo Kota Bandung Jalan Dalem Kaum no 1 Bandung.

## 2. Strategi Atasi Kurangnya Jumlah Petugas Sat Pol PP

Cara lain yang dilakukan oleh Ridwan Kamil untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membentuk tim ketertiban di masing-masing kecamatan yang secara langsung mereka bisa melakukan tindakan di kewilayahan. Selain untuk menyiasati jumlah personil Sat Pol PP yang terbatas, penempatan pasukan ketertiban di kecamatan ini sebagai upaya untuk menyebar kewenangan dan memberikan tanggungjawab kepada wilayah untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.

Ada 300 personil pasukan ketertiban yang disebar di 30 kecamatan di Kota Bandung. Artinya di setiap kecamatannya ada 10 personil. Mereka dibekali seragam khusus warna hijau seperti hansip dan digaji oleh pemerintah daerah.

“Sudah tahu kelemahannya, saya menyiasati dengan sebuah sistem. Saya sebar pasukan ketertiban dibayar oleh pemda, sifatnya kontrak jumlahnya 300 orang , disebar 10 per kecamatan. Mereka berseragam,” kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.<sup>6</sup>

Pasukan ini bertugas untuk menegakkan aturan Kota Bandung yang tertuang di dalam perda. Termasuk soal perda yang mengatur sial PKL. Jika di kecamatan ada pelanggaran fasilitas publik yang digunakan oleh PKL berjualan, maka pasukan ketertiban bisa langsung melakukan tindakan. Hanya saja jika permasalahan terlalu besar dan tidak cukup diselesaikan oleh petugas ketertiban tingkat kecamatan, maka akan diturunkan untuk membantu yaitu petugas Sat Pol PP tingkat kota.

Dalam pelaksanaan penertiban Ridwan Kamil juga melibatkan aparat keamanan. Hal ini dilakukan mengingat jumlah aparatnya di Sat Pol PP tidak akan cukup untuk berhadapan dengan PKL di Kapatihan. Maka secara khusus Walikota datang ke Markas Kodim 0618/Bs dan Mapolrestabes Bandung untuk meminta Bantuan personil untuk melaksanakan tim gabungan. Alhasil penertiban PKL di JL. Kapatihan dilakukan oleh tim operasi gabungan yang melibatkan Sat Pol PP, TNI, dan Polri.

Selama ini Sat Pol PP sering kalah “galak” dengan PKL. Mereka kadang ragu untuk menertibkan PKL yang jumlahnya bisa berkali-kali lipat jika dibandingkan jumlah petugas. Sementara dalam peraturannya petugas Sat Pol PP memang tidak dipersenjatai. Maka dari itu peran TNI dan Polri menjadi jaminan bahwa proses penertiban akan berlangsung aman dan lancar, khususnya dari upaya perlawanan dari pedagang atau juga dari orang-orang yang berada di balik kekuatan PKL.

“Ada (*backing*). Jadi PKL ini backingnya ke tentara, jadi barang pas KTA diambil gruduk-gruduk oleh satpol PP oleh oknum saya lapor. Jadi realitasnya bagaimana mereka merasa aman karena mereka punya backingan dan Pol PP ini tidak punya wibawa. Makanya dari awal saya beresin PKL pasti bawa TNI dan Polri. Tanpa itu wah..,” kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.<sup>7</sup>

Kurangnya jumlah personil ini juga diakui langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Bandung Ferdi Ligaswara. Maka untuk menanggulangi hal tersebut Ferdi melakukan upaya kolaborasi, baik dengan instansi lain di pemerintahan, dengan masyarakat, serta dengan aparat penegak hukum lain seperti TNI dan Polisi.

Upaya kolaborasi ini dianggap sebagai solusi penertiban yang selama ini sudah dilakukan tapi seringkali gagal. Bahkan bagi Ferdi yang sudah menjabat sebagai Kasatpol PP sejak pemerintahan sebelumnya, susah penertiban PKL di Kota Bandung karena PKL hanya menjadi beban tugas Sat Pol PP saja. Padahal permasalahan PKL bukan hanya soal melanggar aturan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Minggu 17 Mei 2015, pukul 22.00 WIB, di Pendopo Kota Bandung Jalan Dalem Kaum no 1 Bandung.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Minggu 17 Mei 2015, pukul 22.00 WIB, di Pendopo Kota Bandung Jalan Dalem Kaum no 1 Bandung.

“Saat yang lalu, kita berkolaborasi ya. Jadi, memang ini kolaborasi yang menjadi kunci utama, saya katakan ini bukan suatu keberhasilan sektoral tapi keberhasilan kolektif, keberhasilan koordinatif ya dalam lingkup tadi, kolaborasi. Saat yang lalu, tidak hanya di Kepatihan Dalam kaum alun begitu kumuh, dari berpuluh puluh tahun bahkan, sulit, kata Ferdi Ligaswara<sup>8</sup>

Cara lain yang dilakukan Ridwan Kamil untuk mengatasi masalah kurangnya jumlah personil adalah dengan membentuk relawan-relawan dari elemen masyarakat. Sejumlah relawan kebersihan kita banyak terbentuk di Kota Bandung seperti *Bandung Clean Action* serta Gerakan Pungut Sampah. Mereka seringkali menjadi bagian dari solusi permasalahan sampah yang disebabkan oleh PKL seusaai berdagang.

Kerja bakti juga menjadi hal kini dianggap keren. Citra itu sengaja dibangun oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil untuk menumbuhkembangkan kembali budaya gotong-royong di lingkungan masyarakat. Maka jika ingin melihat perubahan di Bandung, tak selamanya harus mengandalkan pemerintah. Tetapi masyarakat juga bisa ikut ambil bagian dalam solusi permasalahan di Kota Bandung.

Pasukan ketertiban yang dibuat oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, adalah upaya untuk berinovasi mencari solusi kurangnya jumlah SDM aparat penegak perda Sat Pol PP Kota Bandung. Dalam tugasnya mereka juga bisa saling diperbantukan untuk menguatkan penertiban di salah satu titik seperti di kawasan alun-alun Bandung.

Inovasi ini muncul setelah melakukan beberapa pola strategi dan kajian lapangan. Ridwan mengaku sering turun langsung ke lapangan untuk mengetahui pasti masalah yang ada sembari berpikir mencari solusinya. Jadi ide-ide baru untuk membangun Bandung malah muncul setelah dia melihat kondisi di lapangan.

“Di luar linmas. Linmas ini ada inovasi lagi. Jadi kesimpulannya inovasi itu karena kita banyak observasi di lapangan. Gimana caranya benerin mobil, buku manual *diapalkeun we diutak-atik* sambil menemukan solusinya. Nah, saya lebih banyak yang ke dua. Yang di alun-alun, akhirnya ketemu, piket tanya dari linmas mana. Wah ini mah linmas dari Gedebage, dari Coblong, digilir ke titik-titik,” kata Walikota Bandung Ridwan Kamil.<sup>9</sup>

Nah tim ini pula yang juga bertugas untuk memantau ketertiban di Jalan Kepatihan pasca dilakukan penertiban. Hampir setiap hari tim ketertiban dari Kecamatan Lengkong berpatroli untuk memastikan tidak ada pelanggaran perda yang terjadi di lokasi ini yang diakibatkan oleh PKL.

### **3. Rendahnya Integritas Petugas Sat Pol PP Kota Bandung**

Integritas menjadi poin penting dalam setiap profesi. Tak terkecuali bagi petugas Sat Pol PP Kota Bandung. Bagi penegak hukum, dalam hal ini peraturan daerah, Sat Pol PP dihadapkan dengan godaan-godaan yang menguji integritasnya sebagai petugas.

Pantauan peneliti di lapangan menunjukkan jika masih ada petugas Sat Pol PP yang bisa diajak kompromi. Bocornya razia tak jarang informasinya malah muncul dari orang dalam.

Hal tersebut juga diakui oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Menurut Ridwan Kamil, kebocoran penertiban PKL yang disebabkan oleh oknum petugas Sat Pol PP membuat upaya penertiban yang selama ini dilakukan seringkali gagal. Hal ini yang membuat Ridwan Kamil curiga, karena saat berkeliling Bandung sendiri, Ridwan Kamil melihat keberadaan PKL. Sementara saat dilakukan razia, lokasi tersebut bersih seolah tidak ada permasalahan.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Mantan Kepala Sat Pol PP Kota Bandung, Ferdi Ligaswara, Sabtu 18 April 2015, pukul 10.00 WIB di Kantor Dispora Jalan Aceh no 47 Bandung.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Minggu 17 Mei 2015, pukul 22.00 WIB, di Pendopo Kota Bandung Jalan Dalem Kaum no 1 Bandung.

“Soal razia PKL misalnya. Saya mikir kenapa setiap razia selalu sepi. Padahal pas saya lewat sendiri PKL penuh. Ternyata razia banyak bocor. Iya (dilakukan oleh petugas),” kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Masalah lain yang menjadi ujian bagi integritas petugas Sat Pol PP adalah soal pungutan liar atau pungli. Pungli berkedok retribusi keamanan seringkali dilakukan oleh oknum petugas atau orang suruhan petugas dengan sistem setoran bagi hasil. Maka tak heran jika PKL merasa aktivitasnya berjualan di badan jalan seolah legal, setelah mendapatkan “izin” dari petugas, karena sudah membayar uang retribusi. Hal ini juga diakui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Ferdy Ligaswara, bahwa masih saja ada anggotanya yang membandel di lapangan. Namun Ferdy berharap masyarakat membantunya untuk ikut melaporkan jika ada oknum anggotanya yang malah melakukan pelanggaran hukum.

Penuturan lain disampaikan oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Kepatihan, jika seringkali ada petugas yang mengambil rokok di kiosnya tapi tidak membayar. Ada juga yang meminta jatah makan siang dan tidak memberikan uang.

Diberitakan oleh [www.inilah.com](http://www.inilah.com) pada 16 November 2012, jika ratusan pedagang di Jalan Kepatihan mengaku dimintai pungutan liar oleh oknum petugas Sat Pol PP Kota Bandung.

Seperti yang dituturkan salah seorang PKL, sebut saja, Rizal Rohmana (27). Dirinya mengatakan, sekitar satu minggu lalu, dua orang oknum anggota Satpol PP yang salah satunya berinisial AS, mendatangi para PKL Jalan Kepatihan. Keduanya menjelaskan, agar para PKL dapat berjualan diatas trotoar dengan tenang tanpa diusik Satpol PP dan sesuai peraturan, diwajibkan membayar iuran bulanan sebesar Rp50 ribu per lapak. Selain iuran bulanan, para PKL ini juga dibebankan iuran sebesar Rp3.000 per hari.<sup>10</sup>

Kasus seperti ini sejatinya sudah menjadi rahasia umum. Hanya saja inisiatif dan keberanian untuk menindaknya yang masih lemah. Jika dibiarkan akan membuat upaya penegakan Perda mandeg karena integritas petugas yang masih disangsikan. Bagaimana mungkin pelanggaran Perda bisa ditindak tegas jika aparat penegaknya juga melanggar aturan.

Prilaku meminta dan menerima suap ini menurut Walikota Bandung Ridwan Kamil dilatarbelakangi dua hal. Ada yang melakukannya karena kebutuhan (*need*), ada pula yang melakukannya karena keserakahan (*greed*). Maksudnya bisa jadi sudah berkecukupan dalam hidup, tapi masih melakukan pungutan liar. Untuk itu saat ini Pemerintah Kota Bandung tengah fokus menyelesaikan permasalahan penertiban di lapangan, sembari terus membenahi mental anggotanya di Sat Pol PP Kota Bandung.

“Itu (menerima suap) penyakit yang panjang dan sejak lama. Jadi ada *corruption by need* ada *corruption by greed*. Nah, *problemnya* ada dua. Di lapangan ga beres, disiplin jelek. Minimal sambil memperbaiki disiplin di lapangan ada progres,” kata Walikota Bandung Ridwan Kamil<sup>11</sup>

#### 4. Strategi Tangani Rendahnya Integritas Petugas Satpol PP

Sudah menjadi rahasia umum jika oknum Sat Pol PP Kota Bandung bisa disuap. Hal ini yang dimanfaatkan PKL untuk melanggengkan usahanya di lokasi yang sebenarnya dilarang untuk berjualan. Modusnya bermacam-macam, mulai dari setoran wajib setiap hari sampai dengan pungutan setiap kali operasi. Jika setoran sudah mengalir, maka imbalannya

<sup>10</sup> <http://m.inilah.com/news/detail/1927454/oknum-satpol-pp-tarik-pungli-dari-pkl-kepatihan>

<sup>11</sup> Wawancara dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Minggu 17 Mei 2015, pukul 22.00 WIB, di Pendopo Kota Bandung Jalan Dalem Kaum no 1 Bandung.

adalah setiap kali akan melaksanakan razia maka PKL akan diberitahu. Untuk sementara menepi dan tidak melaksanakan aktivitas dagangannya.

Pantas saja jika selama ini razia yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penertiban PKL dan pelanggaran perda seringkali bocor tanpa membuahkan hasil. Hal tersebut yang membuat Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berpikir mencari solusi untuk memutus mata rantai pembocoran informasi inspeksi mendadak.

Caranya, setiap kali akan melaksanakan razia, Ridwan Kamil meminta *hand phone* petugas Sat Pol PP dikumpulkan. Hal itu untuk mengantisipasi penggunaan HP oleh oknum petugas untuk menyampaikan informasi melalui telepon, sms, *chat application* kepada PKL untuk segera minggir dan berpindah dari lokasi karena akan dilakukan razia

Tak hanya itu, rencana operasi dan lokasi yang akan menjadi daerah operasi penertiban PKL ini tidak diinformasikan sebelumnya. Petugas hanya mengetahui bahwa mereka akan melakukan razia setelah HP dikumpulkan dan di lokasi mana yang akan dirazia pun juga dirahasiakan. Cara ini menjadi strategi yang diterapkan Ridwan Kamil untuk mengurangi tingkat kebocoran razia penertiban PKL.

“Akhirnya saya nyari pola baru. Sekarang setiap mau razia HP dikumpulin. Saya bisa razia, baru setelah HP dikumpulin kita jalan dan ga dikasih tau jalan kemana. Nah cara begitu ternyata efektif,” kata Ridwan Kamil.

Strategi Komunikasi Politik yang dilakukan Walikota Bandung Ridwan Kamil kepada aparat pemerintahannya, dalam hal ini Sat Pol PP Kota Bandung merupakan upaya yang dilakukan dalam memutus rantai mata yang biasa dilakukan oleh sat Pol PP dan PKL di kawasan Jalan Kepatihan Kota Bandung.

Solusi yang lain yang diterapkan pemerintah kota Bandung untuk menertibkan PKL adalah dengan menerapkan sanksi tegas jika ada bawahannya yang diketahui melanggar aturan, termasuk menerima suap. Ridwan Kamil tak segan-segan memutasi anggota Satpol PP yang terbukti melanggar, sampai melakukan pemecatan.

Pada bulan September 2014, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil melakukan pemecatan terhadap lima anggota Sat Pol PP karena ketahuan melakukan pemerasan kepada pengusaha dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah. Ini langkah tegas yang dilakukan untuk meningkatkan integritas petugas Sat Pol PP Kota Bandung.

“Minggu depan saya akan pecat empat sampai lima anggota Satpol PP. Tapi ini masih menunggu sampai penyelidikan terbukti,” kata Ridwan Kami, Jumat (19/9/2014), seperti yang dilansir dalam situs [www.detik.com](http://www.detik.com).<sup>12</sup>

Hukuman mendidik juga diterapkan. Beberapa waktu lalu saat melakukan inspeksi mendadak, dan mendapati bawahannya mendiamkan PKL yang berjualan di area terlarang, padahal di lokasi tersebut adalah lokasi dilarang berjualan, Ridwan Kamil menghukum anggota Sat Pol PP dengan hukuman *push up*. Hukuman tersebut menurut Ridwan Kamil adalah upaya untuk mendisiplinkan anggotanya agar mampu menjadi contoh bagi masyarakat terutama bagi PKL agar tidak diremehkan.

"Ternyata, Satpol PP malah santai-santai saja. Pemkot Bandung butuh aparat-aparat yang berinisiatif, tidak mesti selalu diawasi, juga bekerja tanpa harus menunggu perintah," Kata Ridwan Kamil.

Pernyataan tersebut disampaikan Ridwan Kamil sebagai bentuk kekecewaan saat melihat tugasnya tidak punya inisiatif dalam turut menjaga ketertiban Kota Bandung. Bahkan Ridwan Kamil menilai jika tugasnya hanya bekerja saat diawasi saja. Sementara ketika luput dalam pengawasan, seringkali Sat Pol PP terlihat santai-santai saja. Sehingga tidak disegani oleh PKL.

---

<sup>12</sup> Sumber: <http://news.detik.com/bandung/read/2014/09/19/131716/2695308/486/ridwan-kamil-akan-pecat-oknum-satpol-pp-vang-diduga-memer-as-pengusaha>, diakses Minggu 14 Juni 2015 pukul 13.00 WIB

Dalam berita yang dituliskan oleh [www.tempo.co](http://www.tempo.co) Ridwan Kamil bahkan menyaratkan bagi Sat Pol PP untuk berani berkelahi. Jika tidak berani berkelahi, Ridwan Kamil menyarankan petugas Sat Pol PP mengundurkan diri dan menjadi staf di kelurahan saja.

“Saya bilang, kalau takut berantem jangan jadi Satpol PP. Jadi staf kelurahan aja,” kata Ridwan Kamil, seperti yang dituliskan oleh [www.tempo.co](http://www.tempo.co) pada 28 April 2014, pukul 05.19 WIB.<sup>13</sup>

Pembenahan kedalam memang jadi agenda pemerintah kota. Termasuk bagi Sat Pol PP sendiri. Penertiban yang seringkali gagal jadi catatan dan bahan evaluasi. Kepala Sat Pol PP Kota Bandung Ferdi Ligaswara menyampaikan jika pembenahan dilakukan dengan cara menindak tegas bagi anggotanya yang ketahuan bermain mata dengan PKL atau dengan pelaku pelanggaran untuk dikompromikan.

“Kami juga melakukan penertiban di internal, jadi apabila aparat kami ada yang mencoba berkonspirasi, bermain mata, kita tindak bukan hanya pelanggar kita tindak, aparat pun kita tindak. Disiplin, teratur, tertib dijadikan kebutuhan, bukan tekanan atau paksaan,” kata Ferdi Ligaswara.<sup>14</sup>

Upaya untuk meningkatkan integritas petugas juga gencar dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto untuk menyampaikan arahan-arahan kebijakan walikota kepada PNS-PNS di Kota Bandung. Mereka diajak untuk menjadi bagian dari perubahan yang diusung oleh Ridwan Kamil dan Oded M Danial. Bahkan menurut Yossi yang juga bertindak sebagai “bos”nya para PNS, PNS harus menjadi contoh bagi masyarakat. Bukan malah melanggar aturan yang ada di Kota Bandung. Termasuk untuk para petugas penertiban.

Selama ini juga sering dijumpai masih adanya oknum PNS di lingkungan Kota Bandung yang malah menjadi pelanggar aturan. Yossi menyampaikan jika PNS harus jadi motor penggerak utama dalam setiap perubahan yang diusung oleh pimpinan. Karena filosofi kerja utama bagi PNS adalah menjadi pelayan masyarakat.

“Seringkali saya katakan, mari sama-sama jadi bagian dari perubahan. Kalau tidak jadi perubahan ya jangan jadi penyelenggara negara. Pelayan masyarakat harus utamakan layanan publik dan jadi contoh. Kalau dulu permasalahan budaya. Karena tidak konsistennya birokrasi sebagai penyelenggara negara. Pak Emil ini menjanjikan perubahan yang ekstrim. Dari MPM ke MPS. Kalau MPM kan hanya kebanggan, sedangkan MPS juga memperhatikan bermanfaat,” kata Yossi Irianto.<sup>15</sup>

## DAFTAR REFERENSI

- Creswell, Jhon W. 1998. *Quality Inquiry & Research Design Choosing Among Five Tradition*. London : Sage Publiciation.
- Mulyana, Deddy. 2002. *Metode Penelitin Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komuikasi dan ilmu sosial lainnya*, : Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nimmo, Dan. 2010. *Komunikasi Politik; Khalayak dan Efek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2013. *Komunikasi Politik Politik Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Meleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya

---

<sup>13</sup> Sumber: <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/04/28/058573694/ridwan-kamil-hukum-push-up-satpol-pp-karena-lembek>, diakses Minggu 14 Juni 2015 pukul 14.00 WIB.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Mantan Kepala Sat Pol PP Kota Bandung, Ferdi Ligaswara, Sabtu 18 April 2015, pukul 10.00 WIB di Kantor Dispora Jalan Aceh no 47 Bandung.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Sekda Kota Bandung Yossi Irianto, Senin 1 Desember 2015, pukul 21.00 WIB, di Kantor Radio PRFM Jalan Braga no 5 Bandung.

**Sumber Internet**

[www.detik.com](http://www.detik.com), diakses pada 20 September 2014, pukul 08.00 WIB

[www.okezone.com](http://www.okezone.com), diakses pada 13 Maret 2015, pukul 22.00 WIB.

[www.tempo.co](http://www.tempo.co), diakses 7 April 2015, pukul 15.00 WIB

**Wawancara**

Wawancara dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Minggu 17 Mei 2015, pukul 22.00 WIB, di Pendopo Kota Bandung Jalan Dalem Kaum no 1 Bandung

Wawancara dengan Sekda Kota Bandung Yossi Irianto, Senin 1 Desember 2015, pukul 21.00 WIB, di Kantor Radio PRFM Jalan Braga no 5 Bandung.

Wawancara dengan Mantan Kepala Sat Pol PP Kota Bandung, Ferdi Ligaswara, Sabtu 18 April 2015, pukul 10.00 WIB di Kantor Dispora Jalan Aceh no 47 Bandung

Wawancara dengan beberapa perwakilan PKL Jalan Kepatihan Bandung